

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemahaman sederhana, demokrasi bukan lagi dijadikan sebagai wacana, tetapi impian politik setiap negara terutama negara berkembang. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dan bentuk wujud nyata ialah pelaksanaan pemilihan umum secara langsung.¹ Menariknya, pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara dan pemerintah. Pada sisi ini, pemilihan umum diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, pemilihan umum juga menjadi wadah dalam masyarakat memilih pemimpin sesuai dengan yang mereka inginkan untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri.

Ada hal yang berbeda dimana ketika kita membahas pemilu yang berintegritas, yang didiskusikan ada 2 level yaitu pemilih dan politisi.² Level pemilih adalah ketika pemilih akan memilih calon presiden maupun anggota legislatif yang tidak melakukan praktik politik uang, penggelapan pajak, korupsi, dan tindakan suku agama dan ras (sara). Level kedua yakni politisi yang berintegritas tidak menggunakan cara-cara haram dalam hal meraih suara dalam pemilu. Salah satu topik yang krusial di Indonesia ketika membahas tentang

¹ Mariam Budiardjo. 2018. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm 46

² *Ibid.* Hlm 43

pemilihan umum yaitu menyangkut pengelolaan uang dalam pemilu. Terwujudnya politik elektoral yang berintegritas menjadi pintu masuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia, namun sayangnya, agenda dan praktik peningkatan integritas politik elektoral ternyata dihambat oleh maraknya politik uang.³

Praktik politik uang melibatkan politisi dan pemilih dalam pemilu legislatif. Menurut Gary Goodpaster dalam Lukmajati, bahwa politik uang itu adalah bagian dari korupsi yang sering terjadi dalam proses pemilu. Strategi politik uang yang digunakan oleh juga bersifat kolektif atau jangka panjang seperti memberikan bantuan sosial atau hibah agar seseorang mendapatkan kursi kekuasaan. Maraknya politik uang tidak lepas dari cara pandang masyarakat karena anggapan masyarakat suatu kewajiban tanpa mengetahui latar belakang seseorang atau partai yang akan dipilihnya dalam memimpin nantinya. Politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah atau barang kepada pemilih agar dicoblos saat pemilu.

Menariknya, berbeda dengan Johny Lomulus, menekankan bahwa politik uang merupakan tindakan dalam memberikan jumlah uang kepada pemilih atau pemimpin partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif atau masyarakat pemilih memberikan suara kepada calon yang bersangkutan pemberi bayaran atau bantuan tersebut. Edward Aspinall dalam bukunya Politik Uang Indonesia; Patronase dan Klientalisme di Pemilu Legislatif 2014

³ Burhanudin Muhtadi. 2019. Politik Uang dan New-Normal dalam Pemilu Pasca-Orde Baru. *Jurnal Anti Korupsi Integritas*. 5(1): 55-71

⁴ Dendy Lukmajati. 2017, Praktek Politik Uang Dalam Pemilu 2014 (Kabupaten Blora). *Jurnal Politika*. 7(1): 1-22

menuliskan bahwa politik uang tidak hanya berbentuk distribusi uang tunai saja, tetapi juga dalam bentuk pemberian benda-benda kelompok ataupun pribadi. Ada 5 yang termasuk kategori dalam politik uang, diantaranya (1) Pembelian Suara (vote buying); (2) Pemberian barang pribadi (individual gift); (3) Pemberian barang-barang kelompok; (4) Pelayanan dan Aktivitas; (5) Proyek gentong babi (pork barrel project).⁵ Banyaknya politik uang tidak terlepas dari sudut pandang masyarakat sebagai pemilih yang permisif terhadap politik uang ini.

Politik uang berkaitan dengan latar belakang yang berbeda-beda, salah satunya yaitu status sosial ekonomi masyarakat. Tidak secara keseluruhan masyarakat memiliki status sosial ekonomi yang setara, tetapi terdapat perbedaan. Biasanya politik uang sasarannya pada kelompok masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah misalnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang tidak sekolah, karena pada dasarnya masyarakat bawah rata-rata tidak peduli terhadap pemilu dan lebih fokus pada kegiatan sehari-harinya. Warga yang berstatus sosial sekolah tinggi lebih banyak mengerti dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara khususnya dalam bidang politik karena cenderung dalam kegiatan menimba ilmu sebagai wawasan.

Status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran tersebut seperti tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan sebagainya. Tentunya secara umum, seseorang atau keluarga yang memiliki status sosial ekonomi lebih

⁵ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (ed), 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme di Pemilu Legislatif*. Yogyakarta : Polgov. Hlm 24

tinggi atau lebih baik akan lebih aktif dibandingkan dengan seseorang atau keluarga dengan status sosial ekonominya lebih rendah.

Status sosial menurut Ujang Sumarwan disamakan dengan kelas sosial, yaitu pembagian masyarakat kedalam kelas-kelas yang berbeda atau strata yang berbeda.⁶ Status sosial ekonomi ialah kedudukan seseorang warga negara dalam pelapisan sosial yang disebabkan kekayaan. Seseorang dengan status sosial yang tinggi diperkirakan akan memiliki tingkat pengetahuan politik, serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah. Status sosial ekonomi memiliki pengaruh dalam membentuk sikap politik yang mendorong pandangan perilaku politik seseorang. Pada dasarnya perilaku politik akan menentukan tindakan-tindakan masyarakat tersebut. Maka, berangkat dari status sosial ekonomi yang mempengaruhi sikap politik masyarakat, dapat dikatakan bahwa bila status sosial ekonomi masyarakat rendah akan erat kaitannya dengan politik uang karena dari segi pendidikan dan ekonomi yang dominan rendah. Begitu juga sebaliknya, bila status sosial ekonomi masyarakat tinggi akan berkorelasi minim kaitannya dengan politik uang.

Beralih dari status sosial ekonomi yang mempengaruhi sikap politik masyarakat, dapat dikatakan bahwa bila status sosial ekonomi masyarakat tinggi akan berkorelasi positif terhadap partisipasi politik masyarakat tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila status sosial ekonomi masyarakat rendah akan berkorelasi negatif terhadap partisipasi politik masyarakat. Seperti diungkapkan dalam penelitian oleh Frank Linderfeld, ia menemukan bahwa faktor utama yang

⁶ Ujang Sumarwan. 2011. *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Edisi 2 Cetak 1. Jakarta. PT Ghalia Indonesia.

mendorong orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, ia juga mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutanpun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi dengan orang yang memiliki keamanan ekonomi.⁷

Bagi caleg yang mempunyai modal besar mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memberi barang/uang sebagai biaya transportasi atau beli aqua dimana tujuannya supaya pemilih tersebut datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya kepada caleg tersebut, biasanya mereka menasar pada kelompok masyarakat yang bersatus sosial ekonomi rendah misalnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang tidak punya sekolah sebagai sasaran politik uang, karena pada dasarnya masyarakat bawah rata-rata tidak peduli terhadap pemilu dan lebih fokus pada cara mendapatkan uang.

Politik uang dalam pemilihan umum adalah suatu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Untuk Indonesia, cukup banyak yang mengkaji tentang politik uang. Penelitian yang dilakukan oleh Amanu (2015) menemukan bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah terdiri dari tiga pelaku, atau agen yaitu *pertama*, kandidat calon kepala desa, *kedua*, tim sukses yang terbagi menjadi dua yaitu tim sukses formal dan tim sukses non formal. Kemudian pelaku yang ketiga yaitu pemilih atau masyarakat biasa yang tidak berperan sebagai tim sukses dari kandidat calon kepala desa. Praktik politik uang dilakukan oleh pelaku melalui kegiatan kampanye dan serangan fajar dengan memberikan uang tunai kepada

⁷Frank Linderfeld, diambil dari Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal.156.

pemilih. Kesadaran pelaku serta motivasi atas penghargaan merupakan alasan utama dari calon kandidat agar maju dalam pemilihan tersebut seperti kenaikan status sosial atau prestise di masyarakat maka dengan politik uang menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah yang akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri.

Suprianto dkk juga menemukan bahwa pada umumnya masyarakat tidak setuju dengan adanya praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah serentak. Masyarakat menganggap bahwa adanya politik uang akan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Buton-Utara khususnya Desa Bonegunu serta juga akan berpengaruh nantinya bagi demokrasi. Sedangkan bagi masyarakat yang setuju dengan alasan ekonomi yaitu pemberian calon kepala daerah dalam bentuk uang setidaknya dapat membantu beban kebutuhan sebagian warga. Terakhir penelitian Martinus Laia (2021) menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap politik uang menunjukkan praktek politik uang dalam kategori tinggi, yang mengartikan bahwa praktek politik uang adalah suatu kebiasaan atau tradisi dalam setiap pemilihan umum bukan hanya di pemilihan legislatif tetapi di pilkada bahkan pada pemilihan kepala desa politik uang sering terjadi. Maraknya politik uang dalam pemilihan umum juga tidak lepas dari fenomena kemiskinan dan budaya masyarakat setempat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang yaitu karena kesulitan ekonomi dan kemiskinan yang masih melanda besar pemilih baik yang tinggal dipedesaan maupun diperkotaan. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan dan pengetahuan



masyarakat semakin melingkupi ketidakberdayaan masyarakat ketika berhadapan dengan politik uang.⁸

Penelitian yang dilakukan Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago dengan judul fenomena politik uang pada pemilihan calon anggota legislatif di desa sandik kecamatan batu laya kabupaten lombok barat. Pada penelitiannya disebutkan bahwa penyebab terjadinya politik uang tidak terlepas dari faktor keterbatasan ekonomi yang selalu memunculkan masalah masalah baru, termasuk membuka peluang politik uang dimasyarakat. Artinya bahwa masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah (miskin) cenderung berpikir secara rasional untuk mendapatkan sejumlah keuntungan termasuk ketika menerima imbalan yang diberikan calon-calon atau kontestan politik dalam pemilu. Praktek politik uang susah diberhentikan jika keterbatasan ekonomi dan kemiskinan tetap melanda masyarakat.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, bila dilihat dari penelitian sebelumnya peneliti berasumsi bahwa politik uang terjadi karena rendahnya faktor ekonomi masyarakat serta rendahnya kualitas pendidikan dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang politik uang sehingga tidak memahami bahwa politik uang hal yang tidak benar karena melanggar aturan dalam pemilu. Dengan banyaknya praktik politik uang membuat pola pikir masyarakat berubah bahwa segala sesuatu dapat diukur dengan uang bahkan untuk kepemimpinan. Jika penelitian terdahulu membahas bentuk praktik uang yang terjadi serta faktor yang mempengaruhi, maka dalam penelitian yang

⁸ Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta K. 2019. *Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada pemilihan calon anggota legislatif di Desa sandik Kecamatan batu layar kabupaten Lombok Barat* RESIPROKAL, 1(1), 57.

peneliti lakukan akan berfokus pada lokasi di Kota Padang serta hubungan politik uang dengan status sosial ekonomi itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Politik uang merupakan pertukaran uang dengan posisi kebijakan, keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi kelompok dan partai-partai.⁹ Politik uang (*money politic*) dalam KBBI artinya sogok. Politik uang yang sistemik menunjuk pada strategi jual beli suara. Seperti yang di jelaskan oleh Edward Aspinal dan Mada Sukmajati mengenai pembelian suara (*vote buying*) menjelaskan bahwa kontribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan suara bagi pemberi.¹⁰

Politik uang dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam kampanye dikarenakan dalam kampanye tidak diperkenankan untuk membeli suara rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik uang itu sendiri telah banyak dilakukan oleh para calon dan partai yang berkualitas, politik uang saat ini bukan hal yang tabu lagi oleh kalangan masyarakat. Hal itu tidak menjadi halangan bagi para calon untuk memenangkan kursi yang akan di tempatinya nanti.

Status sosial ekonomi ialah kedudukan seseorang warga negara dalam pelapisan sosial yang disebabkan kekayaan. Seseorang dengan status sosial ekonomi yang tinggi diperkirakan akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada

⁹Fitriyah. 2013. Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. 3(1): 5-14

¹⁰ *Op Cit.* Hlm 24

pemerintah. Status sosial ekonomi memiliki pengaruh dalam membentuk sikap politik yang mendorong pandangan perilaku politik seseorang. Pada gilirannya perilaku politik akan menentukan tindakan-tindakan masyarakat tersebut.

Menurut John Markoff Indonesia pada saat ini sedang mengalami *hybrid* demokrasi, yaitu demokrasi berlangsung bersama-sama dengan praktek-praktek non-demokratis. Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi politik, berjalan beriringan dengan perilaku *money politics* yang sejatinya merusak demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini maka rasionalitas pemilih menjadi layak untuk dipertanyakan. Pemilih tidak lagi memilih calon berdasarkan program dan visi yang ditawarkan tapi hanya berdasar jumlah uang yang diterima menjelang pemilu, dan perilaku memilih di Indonesia sangat di pengaruhi oleh faktor-faktor non-demokratis, seperti politik uang.¹¹

Berikut merupakan Tabel angka presentase dari pemilih di Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2019.

Tabel 1.1
Jumlah DPT dan Presentase Hasil Pemilih Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Presentase
1	Kab. Dharmasraya	143.907	89,0%
2	Kab. Pasaman Barat	250.723	88,1%
3	Kota Solok	47.418	86,4%
4	Kota Sawahlunto	45.778	85,2%
5	Kota Payakumbuh	88.849	84,4%
6	Kota Pariaman	61.523	84,3%
7	Kab. Solok Selatan	141.161	83,1%
8	Kota Padang Panjang	38.781	82,5%
9	Kab. Pesisir Selatan	331.260	81,6%
10	Kab. Pasaman	199.836	81,5%
11	Kab. Sinjungjung	156.595	81,4%
12	Kab. Lima Puluh Kota	265.161	81,0%
13	Kep. Mentawai	63.103	80,5%

¹¹ John Markoff. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia : Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta. CCSS dan Pustaka Pelajar.

14	Kota Padang	529.162	79,6%
15	Kota Bukittinggi	81.447	78,0%
16	Kab. Solok	281.902	74,5%
17	Kab. Tanah Datar	276.615	72,7%
18	Kab. Agam	365.029	71,5%
19	Kab. Padang Pariaman	313.987	69,5%
	Total	3.718.237	79,9%

Sumber: Data Sekunder KPU Sumatera Barat

Berdasarkan Tabel I.I di atas, bahwa Kota Padang memperoleh jumlah 79,6% pada Tahun 2019. Data di atas peneliti menduga ada hubungannya praktik uang dengan status sosial ekonomi masyarakat yang diduga menjadi salah satu faktor tingginya presentase dari partisipasi masyarakat Kota Padang pada pemilihan legislatif 2019. Politik uang ini dapat mempengaruhi pilihan seseorang untuk memilih calon kandidat bukan berdasarkan pilihan sendiri tetapi dalam kategori pembelian suara serta keadaan ekonomi seseorang. Tinggi angka tersebut peneliti ingin melihat apakah ada hubungan politik uang dengan status sosial ekonomi masyarakat pada pemilihan legislatif sehingga memperoleh cukup tinggi suara di daerah tersebut.

Tabel 1.2
Pendidikan Masyarakat Kota Padang Tahun 2019

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total (Jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum Sekolah	105.355	99.042	204.397
Belum Tamat SD/Sederajat	58.816	51.587	105.403
Tamat SD/Sederajat	43.342	47.548	90.890
SLTP/Sederajat	60.006	56.262	116.268
SLTA/Sederajat	140.991	130.048	271.039
DIPLOMA I/II	1.943	5.064	7.007
AKADEMI/DIPLOMA III	11.028	16.839	27.867
DIPLOMA IV/STRATA I	33.823	41.003	74.832
STRATA II	4.435	3.990	8.425
STRATA III	659	317	976
JUMLAH	455.404	451.700	907.104

Sumber Data Disdukcapil Sumbar

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kota Padang di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/Sederajat dengan jumlah jiwa 271.039 kemudian diikuti oleh tingkat pendidikan Tidak/Belum sekolah dengan jumlah 204.397 jiwa lalu diikuti oleh tingkat pendidikan SLTP/Sederajat dengan jumlah 116.268 jiwa. Sehingga dengan ini diketahui bahwa bagi kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi mereka lebih memilih untuk meningkatkan rutinitas pribadi dibandingkan terlibat dengan politik uang. Berbeda halnya dengan masyarakat yang berada dalam tingkat pendidikan sedang ataupun rendah, dimana mereka lebih tertarik pada praktik politik uang yang dilakukan oleh para tim sukses saat kampanye yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti disediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang memilih kandidat

Tabel 1.3
Jenis Pekerjaan Masyarakat Kota Padang Tahun 2019

Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total (Jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak/Belum Bekerja	118.700	105.121	223.821
Aparatur/Penjabat Negara	26.804	19.524	46.328
Tenaga Pengajar	3.107	9.183	12.290
Wiraswasta	176.312	37.967	214.279
Pertanian/Peternakan	10.265	518	10.783
Nelayan	4.803	14	4.817
Agama dan Kepercayaan	254	28	282
Pelajar/Mahasiswa	103.545	93.763	197.308
Tenaga Kesehatan	542	2.569	3.111
Pensiunan	10.873	5.701	16.574
Lainnya	199	177.312	177.511
JUMLAH	455.404	451.700	907.104

Sumber: Data Sekunder Disdukcapil

Berdasarkan data di atas dapat dilihat pekerjaan status sosial ekonomi, Kota Padang didominasi dengan aspek wiraswasta yang mana merujuk teori dari syamsir dikategorisasikan sebagai status sosial sedang. Keadaan masyarakat yang

berfokus dengan pekerja dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf status sosial ekonomi. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung kurang memenuhi aspirasi masyarakat, terkhusus pada kegiatan pemilu legislatif yang diselenggarakan tahun 2019 lalu. Hal ini dikarenakan pekerjaan sebagai wiraswasta yang tidak tergantung hari libur nasional, melainkan bergantung pada lingkungan. Kegiatan politik masyarakat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, dimana semakin kaya seseorang maka akan semakin tinggi kemampuannya untuk memenuhi tingkatan kebutuhannya.

Bawaslu Sumatera Barat menyatakan potensi terjadinya politik uang di Sumbar cukup tinggi sehingga langkah antisipasi harus intensif dilakukan kepada masyarakat agar hal ini tidak terjadi. Sekiranya ada 17 kasus tersebut hasilnya divonis bersama 16 kasus dan satu divonis bebas. Kasus itu tersebar di 19 Kota dan Kabupaten yaitu Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Sawahlunto, Limapuluh Kota, Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kabupaten Tanah Datar.¹²

Pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Padang, terindikasi adanya politik uang yang terjadi pada pemilihan legislatif. Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat menangani laporan politik uang atas calon legislatif terpilih dari Partai Gerindra yang maju pada daerah pemilihan (Dapil) 3 Padang (Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung). Laporan masuk atas nama

¹²Bawaslu Sumbar: Politik Uang Kerap Dianggap Budaya Dalam Pemilu (<https://m.antaranews.com/amp/berita/3276657/bawaslu-sumbar-politik-uang-kerap-dianggap-budaya-dalam-pemilu>) di akses pada tanggal 30 November 2022, pukul 15.21.

masyarakat dengan Terlapor (AT), caleg Gerindra Dapil 3, terlapor adalah salah satu calon legislatif terpilih.

....AD sebagai tim sukses dari caleg berinisial AT di Kecamatan Lubuk Begalung mengatakan bahwa disetiap daerah pilih berbeda tim sukses yang melakukannya. AD hanya memegang koordinator wilayah daerah pilih di Kecamatan Lubuk Begalung. AD memberikan berupa uang tunai nominal Rp 50.000 – Rp 100.000 perorang. Strategi awalnya dengan meminta fotocopy KTP pemilih, kemudian fotocopy KTP yang berikan pemilih itu direkap agar tau berapa jumlah orang yang akan diberikan uang tunai. Cara itu untuk mencocokkan berapa jumlah suara perdaerah jika disetiap daerah memperoleh 100 suara sah maka uang yang dikeluarkan untuk 100 orang yang telah memilih caleg AT. Uang tunai diberikan setelah pencoblosan. Setelah pencoblosan masyarakat yang telah memberikan fotocopy KTP tadi dikumpulkan disalah satu rumah masyarakat untuk memberikan uang tunai yang telah dijanjikan.¹³ (Wawancara dengan AD, selaku Timsukses caleg berinisial AT dapil 3, di rumah AD di Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Pada Tanggal 4 Oktober 2022).

Sejumlah tokoh masyarakat Kelurahan Tarantang dan Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat juga mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang melaporkan adanya indikasi kecurangan politik uang pada daerah ini, yang dilakukan oleh oknum caleg dari partai yang diprediksi bakal memenangkan pileg 2019. Aksi politik yang dilakukan oknum caleg tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji yang dapat merusak tatanan demokrasi Indonesia khususnya Kota Padang.

Politik uang terjadi ketika dilakukan pemilihan suara ulang di Kecamatan Lubuk Kilangan dan sejumlah kecamatan lainnya di Kota Padang, pada 27 April 2019. Selain kasus didaerah Dapil 3 di Kota Padang, juga ada kasus politik uang terjadi di kecamatan Padang Selatan yang diduga dilakukan calon anggota DPRD

¹³ Wawancara dengan AD, selaku Timsukses caleg berinisial AT dapil 3, di rumah AD di Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Pada Tanggal 4 Oktober 2022

Kota Padang berinisial BR dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Padang IV yang meliputi Kecamatan Padang Selatan dan Padang Timur.¹⁴

Terjadinya politik uang itu tidak hanya berupa uang tetapi bisa berupa jasa, aksesoris atau janji yang diberikan oleh calon kandidat agar mendapat suara atau hak pilih dari masyarakat. Status sosial ekonomi diasumsikan menjadi salah satu faktor yang terjadinya politik uang pada masyarakat. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh status sosial ekonomi dengan politik uang. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa terjadinya politik uang ada hubungannya dengan status sosial ekonomi masyarakat karena politik uang diterima oleh kalangan yang pendidikannya sedang serta keadaan ekonomi masyarakat yang rendah sedangkan sumber daya manusia meningkat dan politik uang ini terjadi akibat banyaknya persaingan antar kandidat untuk memperoleh suara yang diinginkan untuk mendapatkan kursi. Sesuai dengan latar belakang dan data yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini: Bagaimana hubungan politik uang dengan status sosial ekonomi masyarakat pada pemilu legislatif Kota Padang Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan politik uang dengan status sosial ekonomi pada Pemilu Legislatif di Kota Padang Tahun 2019.

¹⁴ Prokabar.com. 2019. Bawaslu Padang Tindaklanjuti Dugaan Politik Uang Caleg Gerindra (online). (<https://prokabar.com/bawaslu-padang-tindaklanjuti-dugaan-politik-uang-caleg-gerindra/> diakses pada 29 februari 2020, pukul 20.00)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam penggunaan teori politik uang dan status sosial ekonomi, serta dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan fenomena terkait dengan praktik politik uang dalam pemilihan umum.
2. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai minat dan ketertarikan untuk mengkaji politik uang serta hubungannya dengan status sosial ekonomi dalam pemilihan umum, serta menambar pustaka bidang Ilmu Politik.
3. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan gambaran, pemahaman, dan acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai politik uang dalam pemilihan umum legislatif serta untuk pihak-pihak terkait seperti Bawaslu dan Panwaslu lebih bisa meningkatkan peranannya sebagai pengawas pemilihan umum.

